

TANTANGAN DAN PELUANG DINAS SOSIAL DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JEMBER

Oleh

Suprianik¹, Dindi Nur Safitri², Tika Wulandari³, Tri Linda Arasati⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akutansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas
Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Jl. Mataram No.1, Karang Mluwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember,
Jawa Timur 68136

Email: ¹suprianik@uinkhas.ac.id, ²dindinursafitri@gmail.com,
³cikawulandari1212@gmail.com, ⁴trilindaarasati@gmail.com

Abstract

Advancements and improvements in basic social services are critical aspects in addressing continually evolving social issues, requiring a holistic and integrated approach. Focusing on the need to ensure access to basic social services in order to create a higher level of well-being and quality of life, this study explores the necessity for innovation in the social welfare system. Through an analysis of the provision of integrated social welfare services in Jember Regency, East Java, this study aims to identify opportunities and obstacles in its implementation, as well as to formulate strategic policies moving forward. Data was obtained from an extensive literature review and analyzed using the SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) framework. Findings indicate that the provision of social welfare services in Jember Regency still faces several challenges, which hinder the achievement of service optimization. Nonetheless, there are significant opportunities that can be leveraged through the development of more supportive policies. This study emphasizes the importance of the role of the Social Services Agency in directing responsive and adaptive social service reforms to the dynamics of social change, both at the local level and more broadly.

Keywords: *Social Welfare Services, Social Services Agency, Social Service Reform, Opportunities, Obstacles*

PENDAHULUAN

Dinas Sosial di Kabupaten Jember memegang peranan strategis dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, menghadapi serangkaian tantangan sekaligus mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi penduduknya. Berdasarkan kerangka yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kegiatan ini melibatkan koordinasi dan implementasi tindakan yang sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan, dengan tujuan utama memenuhi

kebutuhan dasar semua warga negara dan mengatasi kemiskinan dalam segala bentuknya.

Dari penjelasan tentang maksud pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ini Pendekatan yang diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan ketentuan UUD 1945, dengan fokus pada empat elemen utama: pihak-pihak yang terlibat, jenis kegiatan, kelompok sasaran, dan mekanisme pelaksanaan. ¹Dalam praktiknya, inisiatif

¹ Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara

RI Tahun 2009 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 4967. Accessed Febrary 5, 2024.

tersebut melibatkan kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan berbagai entitas kesejahteraan sosial untuk memberikan layanan yang mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial kepada individu dan kelompok yang membutuhkan.

Chambers (1987) mengemukakan bahwa Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini adalah kemiskinan yang mendalam yang masih dialami oleh sejumlah keluarga, seperti yang terungkap dalam survei Program Perlindungan Sosial oleh Badan Pusat Statistik tahun 2011. Data ini menunjukkan adanya sekitar 2,5 juta keluarga dalam klasifikasi kemiskinan ekstrem, yang memerlukan strategi dan intervensi yang lebih efektif dan menyeluruh untuk memperbaiki kondisi mereka.²

Dalam menghadapi tantangan ini, Dinas Sosial Kabupaten Jember telah mengambil langkah proaktif dengan merancang dan melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk memberikan dukungan khusus kepada kelompok masyarakat yang rentan. Program-program ini tidak hanya fokus pada penyediaan bantuan langsung, tetapi juga pada pembangunan kapasitas individu dan komunitas melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan mempromosikan kemandirian finansial, sehingga membantu individu dan keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kesinambungan antara perencanaan dan implementasi program menjadi kunci keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember. Dengan memperhatikan hasil yang telah dicapai dan mengevaluasi dampak jangka panjang dari intervensi yang dilakukan, Dinas Sosial

berupaya untuk tidak hanya mengatasi gejala kemiskinan, tetapi juga untuk menangani akar penyebabnya. Hal ini dilakukan melalui pendekatan holistik yang memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan sosial, dengan demikian memperbaiki kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Melalui analisis yang mendalam terhadap program yang dijalankan dan pencapaian yang telah diraih, tujuan utama dari diskusi ini adalah untuk menggambarkan bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Jember secara efektif berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kabupaten Jember menjadi contoh penting dari bagaimana intervensi sosial yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan secara strategis dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan individu dan komunitas.

LANDASAN TEORI

Strategi Peningkatan Kualitas melalui Pelayanan Sosial terintegrasi

Pelayanan dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh entitas atau individu yang bertanggung jawab, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Meskipun aktivitas tersebut seringkali ditujukan untuk kepentingan umum, tidak berarti hanya layanan yang bersifat kolektif saja yang termasuk. Layanan terhadap individu juga dianggap relevan selama masih berada dalam konteks pemenuhan kebutuhan atau keinginan kelompok yang lebih luas, sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Dalam konteks ini, Moenir (2006) menekankan bahwa esensi dari pelayanan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>

² Chambers, R. (1987). *Pembangunan Desa mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES

dan merespons kebutuhan kolektif maupun individu dalam masyarakat, dengan cara yang efektif dan efisien. Pelayanan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengukur keberhasilan melalui jumlah orang yang dilayani, tetapi juga melalui tingkat kepuasan dan dampak positif yang dihasilkan bagi penerima layanan.³

Menyelenggarakan layanan sosial berperan krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan, sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan dalam komunitas. Inisiatif ini, yang ditangani oleh entitas pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat, dirancang untuk mengatasi kekurangan dalam aspek material, spiritual, dan interaksi sosial bagi individu. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang berkualitas dan memiliki akses terhadap sumber daya yang memungkinkan pengembangan potensi diri. Hal ini diharapkan akan membantu mereka dalam menjalankan peranan sosial dengan lebih efektif (interpretasi dari ide layanan sosial).

Layanan sosial merupakan kumpulan kegiatan yang dirancang secara sistematis dan diorganisir oleh institusi tertentu dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup individu. Berdasarkan pendapat Suharto (2009), kesejahteraan dapat diartikan sebagai seluruh proses dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, termasuk di dalamnya adalah pengorganisasian sistem layanan sosial dan pengadaan jaring pengaman sosial untuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari pembangunan sosial adalah untuk mengeliminasi permasalahan sosial dan

memenuhi keperluan dasar manusia dengan menggunakan strategi layanan sosial.⁴

Dari sudut pandang ini, kesejahteraan tidak hanya berfokus pada aspek materi saja, tapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual dan sosial, sehingga setiap individu dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Ini berarti bahwa layanan sosial harus dirancang sedemikian rupa untuk tidak hanya menangani masalah jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kemampuan individu dan kelompok dalam jangka panjang. Layanan sosial, dalam esensinya, adalah tentang menciptakan lingkungan yang mendukung agar setiap orang dapat mencapai potensi maksimalnya dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat.

Pelayanan sosial adalah wujud praktik dalam pengelolaan kesejahteraan sosial, dengan niat utama untuk memajukan tingkat kesejahteraan, meningkatkan kualitas kehidupan, dan memastikan keberlanjutan hidup melalui berbagai upaya seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial, sebagaimana dipaparkan oleh Siporin pada tahun 1975.⁵ Mengikuti pandangan ini, Brenda & Milley pada tahun 2005 menyatakan bahwa esensi dari pelayanan sosial terletak pada usaha untuk memperbaiki dan mengembangkan karakter serta struktur sosial komunitas. Ini bertujuan untuk membangun, menjaga, dan menguatkan fondasi kesejahteraan sosial. Kelompok yang menjadi fokus dalam layanan sosial ini adalah individu atau komunitas yang tengah berjuang dengan isu-isu sosial.⁶

Dengan demikian, layanan sosial bertindak sebagai alat penting dalam upaya kolektif untuk mendukung individu yang

³ Moenir, H, A, S. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

⁴ Suharto, E. (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Corporate Social Responsibility. Bandung: Alfabeta

⁵ Siporin, M. (1975). Introduction to Social Work Practice. New York: Macmillan Publishe

⁶ Dubois, Brenda & Karla K. Miley. 2005. Social Work an Empowered Profession. USA : USA. Pearson.

menghadapi tantangan sosial, dengan tujuan untuk tidak hanya mengatasi masalah tersebut tapi juga untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan pertumbuhan sosial mereka dalam jangka panjang.

Dalam upaya memperkuat pemahaman bersama dan memastikan dedikasi terhadap aksi kolektif, proyek percontohan dilaksanakan pada tahun 2013 oleh Bupati Jember dengan mengeluarkan sebuah keputusan. Ini dikenal sebagai Komitmen Bupati Kabupaten Berau dengan nomor keputusan: PERDA KABUPATEN JEMBER NO. 8 TAHUN 2015,⁷ yang menyatakan kesediaan Kabupaten Jember untuk menjadi model awal dari program "Kabupaten Jember Sejahtera". Sebagai langkah lanjutan, Maka, terciptalah Satuan Tugas Khusus Daerah sebagai wadah untuk Layanan Kesejahteraan Sosial Terintegrasi. Inisiatif ini diperkaya dengan kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seiring dengan pengukuhan komitmen yang tulus dalam memajukan kesejahteraan tersebut, yang diresmikan melalui Peraturan Bupati Jember dengan nomor: PERBUP JEMBER NO. 11 TAHUN 2021, yang menjelaskan tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial kabupaten Jember⁸

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan: A.) meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat; B.) memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian; C.) meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; D.) meningkatkan kemampuan, kepedulian dan

tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; E.) meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; F.) meningkatkan kualitas pelayanan, manajemen dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; G.) mengembangkan potensi sosial H.) mencegah terjadinya masalah sosial; I.) mencegah kerawanan sosial; J.) mendayagunakan sumber daya sosial; dan K.) memberdayakan penerima layanan dan/atau warga binaan sosial.

Menciptakan sebuah institusi yang kapabel dalam menyediakan layanan terintegrasi kepada komunitas adalah tujuannya. Integrasi layanan ini berlandaskan pada nilai keadilan yang berlaku universal, yang menjamin pemenuhan hak-hak dasar bagi warga kurang mampu dan/atau yang tengah menghadapi tantangan sosial. Koordinasi lintas sektor di tingkat Kabupaten/Kota menjadi esensial sebagai entitas pelaksana di tingkat lokal, dalam rangka membawa kesuksesan program layanan terintegrasi di daerah Kabupaten Jember.

Tantangan

Tantangan merupakan suatu keadaan di masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Jember, dapat diketahui bahwa tantangan Dinas Sosial di lima tahun yang akan datang tidaklah mudah. Hal ini didasarkan pada beberapa kondisi yang memang masih sangat membutuhkan penanganan yang serius.

⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember Accessed February 7, 2024.

<file:///C:/Users/user/Downloads/PENGUNDANGAN%20PERDA%20PMKS.pdf>.

⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Accessed February 8, 2024.

<file:///C:/Users/user/Downloads/PERBUP%2011%202021%20KSOTK%20DINAS%20SOSIAL%20OCR.pdf>.

Faktor Penghambat Implementasi Bantuan Sosial Kepada Masyarakat. Dalam menjalankan sebuah program termasuk menjalankan sebuah tugas perbantuan akan selalu ada tantangan yang akan dihadapi. Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember yakni sebagai berikut:

1. Informasi atau Data Pribadi Penerima Bantuan Tidak Lengkap

Data penerima bantuan sosial yang digunakan pada tahun 2023 ini berasal dari data penerima bantuan sosial tahun 2022. Jika terjadi kesalahan dalam data pribadi penerima bantuan sosial, seperti kesalahan penulisan nama, NIK yang salah, atau ketidakakuratan data, meskipun orang tersebut terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di DTKS, akan mengakibatkan penolakan dan tidak mendapatkan bantuan sosial. Bantuan sosial hanya akan disalurkan dengan benar jika data yang digunakan adalah yang tepat. Jika data yang digunakan salah, maka bantuan sosial akan diterima oleh pihak yang seharusnya tidak menerima. Dampaknya adalah masyarakat yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial merasa diabaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendataan yang akurat menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

2. Data Penerima Bantuan Sosial Tidak Diperbarui

Data yang dimiliki oleh Dinas Sosial perlu diperbarui secara terus-menerus melalui pelaporan ke DTKS. Hal ini bertujuan untuk menghindari penerimaan bantuan sosial oleh mereka yang sebenarnya mampu. Selain itu, penting juga untuk mencatat masyarakat yang telah pindah ke daerah lain atau telah meninggal dunia agar bantuan sosial dapat diberikan dengan akurat. Bagi masyarakat yang merupakan penerima bantuan sosial dan

pindah domisili, mereka diharuskan melapor kepada pemerintah setempat agar bantuan sosial yang seharusnya mereka terima dapat diberikan sesuai dengan alamat baru mereka, sehingga mereka tetap dapat mendapatkan bantuan sosial yang sesuai. Terdapat juga banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di DTKS atau tidak. Untuk memastikan, pendaftaran mereka di DTKS, Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melakukan sosialisasi yang memungkinkan seseorang mengetahui status pendaftarannya dengan cara langsung menghubungi Dinas Sosial Kabupaten Jember dengan menunjukkan KTP dan KK, atau melalui akses email.

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Melalui pengamatan langsung, ditemukan bahwa banyak Keluarga Penerima Manfaat yang tampak lebih berkecukupan dibandingkan dengan anggota masyarakat sekitarnya yang tidak termasuk dalam kategori Penerima Bantuan Sosial. Faktor-faktor yang telah ditetapkan dalam menentukan penerima bantuan sosial terlihat tidak berpengaruh secara signifikan. Masyarakat secara umum memiliki pandangan bahwa bantuan sosial akan terus disalurkan, sehingga mereka mengandalkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, pola pikir masyarakat menjadi terpaku pada harapan akan bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah.⁹

Peluang

Peluang merupakan kumpulan dari hal-hal yang berpotensi sebagai faktor penunjang keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Jember, maka dapat dirumuskan beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Sosial, antara lain:

1. Adanya bantuan dari potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

⁹ "Peluang_dan_Tantangan_Pelayanan_Kesejaht.Pdf" Accessed February 9, 2024.

<https://media.neliti.com/media/publications/52870-ID-peluang-dan-tantangan-pelayanan-kesejaht.pdf>

Ada beberapa Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang turut membantu Dinas Sosial dalam mencapai target sasaran kinerja yang telah ditetapkan, antara lain TAGANA, PKH, TSKS dan Peksos. Tagana turut memberikan bantuan tenaga, seperti mendirikan dapur umum serta membantu proses trauma healing bagi korban bencana alam dan sosial.¹⁰ PKH memberikan bantuan program program kementerian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir miskin, seperti bantuan uang untuk ibu hamil miskin, bantuan uang SPP untuk anak usia sekolah dari keluarga miskin, pendataan peserta penerima beras sejahtera (Rastra), TSKS memberikan bantuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data PMKS. pendampingan pendistribusian dan pembagian Rastra bersama PKH. pendampingan pendistribusian dan pembagian KIS (Kartu Indonesia Sejahtera) bersama PKH. Peksos memberikan bantuan tenaga pendampingan untuk PMKS yang membutuhkan penanganan berupa rehabilitasi.

2. Adanya bantuan dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan Dinas Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki tiga bidang, yang pertama yaitu bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial yang memiliki tugas utama. merehabilitasi PMKS yang perlu di rehabilitasi, contohnya adalah penderita psikotik maupun lansia terlantar. Seringkali saat ditemui, penderita psikotik dan lansia terlantar tersebut ditemukan dalam kondisi sakit sehingga memerlukan bantuan penanganan dari dinas kesehatan/puskesmas terlebih dahulu sebelum akhirnya direhabilitasi oleh Dinas Sosial. Yang kedua yaitu bidang pemberdayaan sosial yang memiliki tugas utama terkait kelembagaan sosial, contohnya LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga) yang menangani keluarga bermasalah. Selain LK3, ada juga YGA (Yayasan Gerontologi Abiyoso) yang menjadi wadah bagi kegiatan yang melibatkan lansia.¹¹

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang berjudul "Tantangan dan Peluang Dinas Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember," metodologi yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai realitas sosial yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, termasuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teknik Pengumpulan Data Data primer dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk: Wawancara Mendalam: Dilakukan terhadap pekerja sosial, pegawai Dinas Sosial, dan stakeholder terkait lainnya untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Observasi: Pengamatan langsung pada aktivitas dan implementasi program Dinas Sosial memberikan insight tambahan tentang operasional dan interaksi dengan masyarakat. Dokumentasi: Review dokumen kebijakan, laporan kegiatan, dan literatur terdahulu yang relevan mendukung analisis kontekstual dan historis. Analisis data dilakukan dengan cara mengkategorikan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen ke dalam tema-tema spesifik yang berkaitan dengan tantangan dan peluang. Pendekatan analisis tematik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dan menghubungkan antara temuan lapangan dengan teori dan praktik yang ada dalam

¹⁰ Wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Jember Ibu Rini Ramayanti S. sos

¹¹ "379-Article Text-1451-1-10-20230606.Pdf" Accessed February 10, 2024.
<https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/download/379/372>

literatur kesejahteraan sosial. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis tematik, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang informatif dan praktis bagi pemangku kebijakan dan praktisi dalam bidang kesejahteraan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Jember, terletak di Provinsi Jawa Timur, merupakan sebuah wilayah yang memiliki potensi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Berjarak sekitar 200 kilometer dari Surabaya ke arah timur, Jember memiliki posisi strategis yang ditandai dengan koordinat geografis antara 11330° hingga 11345° Bujur Timur dan 800° hingga 830° Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 3.293,34 km² yang dibagi menjadi 31 kecamatan dan 248 desa/kelurahan, serta populasi penduduk sekitar 2.168.732 jiwa, kabupaten ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.¹²

Berdasarkan data yang disampaikan, persentase kemiskinan pada tahun 2023 menunjukkan tren penurunan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator utama:

- a) Persentase Penduduk Miskin: Terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari Maret 2022 ke Maret 2023. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin adalah 9,36%, yang menunjukkan penurunan 0,21 poin persentase dibandingkan dengan September 2022 dan penurunan 0,18 poin persentase dibandingkan dengan Maret 2022.

- b) Jumlah Penduduk Miskin : Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah 25,90 juta orang, menunjukkan penurunan sebesar 0,46 juta orang dibandingkan dengan September 2022 dan penurunan 0,26 juta orang dibandingkan dengan Maret 2022.
- c) Persentase Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan : Tercatat penurunan persentase penduduk miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan dari September 2022 ke Maret 2023. Persentase penduduk miskin perkotaan turun dari 7,53% di September 2022 menjadi 7,29% di Maret 2023, dan persentase penduduk miskin perdesaan turun dari 12,36% di September 2022 menjadi 12,22% di Maret 2023.
- d) Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan dan Perdesaan : Juga menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin di kedua sektor tersebut dari September 2022 ke Maret 2023. Jumlah penduduk miskin perkotaan menurun sebesar 0,24 juta orang dan jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebesar 0,22 juta orang pada periode yang sama.¹³

Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023 menunjukkan adanya tren penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember yang signifikan. Persentase penduduk miskin turun menjadi 9,36%, menunjukkan penurunan sejak tahun 2010. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi dan berhasilnya inisiatif yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan. Namun, untuk terus memperkuat upaya ini dan

¹² "Profil Kab Jember.Pdf." Accessed January 31, 2024.
<https://snaiaikapd.or.id/hotel/Profil%20Kab%20Jember.pdf>.

¹³ Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

mengatasi tantangan yang ada, peran Dinas Sosial menjadi krusial.¹⁴

Dinas Sosial Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam memobilisasi sumber daya dan menyelenggarakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, Dinas Sosial berupaya untuk mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat secara efektif dan inklusif. Program dan kegiatan yang dilaksanakan ditargetkan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, memastikan akses yang lebih luas terhadap layanan sosial dasar, dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok rentan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil dan kurang terlayani. Dinas Sosial perlu meningkatkan upaya dalam pemetaan dan identifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, serta memastikan distribusi sumber daya yang merata. Di sisi lain, peluang besar terletak pada pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam penyampaian layanan sosial. Integrasi sistem informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program bantuan sosial.

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan, baik dari segi jumlah individu maupun persentase populasi. Ini menunjukkan adanya langkah maju dalam kondisi ekonomi dan inisiatif yang berhasil dalam mengurangi

kemiskinan, khususnya di wilayah Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.¹⁵ Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah serta Dinas Sosial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember menjadi sangat penting. Dinas Sosial setempat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditargetkan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat, memastikan akses yang lebih luas terhadap layanan sosial dasar, dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok rentan. Melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, Dinas Sosial berupaya mengidentifikasi dan menanggapi kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan inklusif, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pengurangan kemiskinan di Kabupaten Jember.

Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019 disusun ke dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah tahun 2019 – 2024 yang kemudian diintegrasikan ke dalam program icon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 tentang evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Jawa Timur.¹⁶ Pengalaman Kabupaten Jember dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan sumber daya secara strategis dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan

¹⁴ Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023." Accessed February 10, 2024.

<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2023). Profil Kemiskinan Maret 2023 Kabupaten Jember. <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/11/28>

<5/profil-kemiskinan-maret-2023-kabupaten-jember.html>

¹⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2023). Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2023. Diakses dari https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wp-content/uploads/dokren/rat_jatim_2023.pdf

Daerah tahun 2019 – 2024, yang merupakan bagian dari RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ini.

Dapat disimpulkan, Dinas Sosial Kabupaten Jember berada di garis depan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, serta pemanfaatan teknologi, Dinas Sosial dapat memperkuat upaya dalam memberikan layanan yang lebih baik dan mencapai tujuan pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jember.

DOKUMENTASI



Mengunjungi kades jombang untuk memintai hasil Rekapitulasi jumlah data penerima dan permintaan bantuan serta penanganan langsung odgj yang kabur, warga disabilitas, serta lansia yang belum terdaftar (sebab tidak memiliki ktp) daerah Jombang Jember, Jawa Timur



Penanganan odgj yang kabur, ikut serta menyerahkan, memeriksa perkembangan, serta sosialisasi nya ke Yayasan untuk dipulihkan.



Berbagi sembako kepada warga sekitar jl. Tawes Kabupaten Jember, Jawa Timur.



KESIMPULAN

Dalam kegiatan pengabdian ini dapat di simpulkan bahwa tantangan dan peluang dinas sosial dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Jember menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai hambatan, penyaluran bantuan sosial Kabupaten Jember, dinas sosial telah melaksanakan tugas dan kewajiban nya

dengan sangat baik, seperti banyaknya bantuan sosial yang telah tersalurkan, pasien odg, anak terlantar, dan penyandang disabilitas lainnya yang telah di tangani serta peluang yang telah di ambil oleh dinas sosial contoh bantuan yang di berikan oleh potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS), Juga dari SKPD lain yang memiliki tupoksi linier dengan dinas sosial, serta bantuan dari pusat APBN dan dari provinsi APBD yang telah di terima oleh dinas sosial.

Dari hal ini kontribusi dan upaya dinas sosial dalam kesejahteraan masyarakat sudah di jalani dengan baik meskipun munculnya keluhan menunjukkan perlunya peran yang lebih aktif dalam pengawasan. Penyaluran bantuan sosial di Kabupaten jemmer menghadapi beberapa masalah, seperti tidak tepatnya sasaran untuk penerima bantuan sosial, kelengkapan informasi dan data pribadi penerima bantuan sosial yang kurang. Selain itu, kesulitan dan hambatan dalam penyaluran bantuan sosial juga disebabkan oleh data penerima bantuan yang belum diperbarui. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bekerja dan berusaha sendiri tidak hanya mengandalkan bantuan dari dinas sosial karna itu juga berpengaruh pada pola pikir masyarakat yang masih menilai bahwa bantuan sosial sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 12, Tambahan Lembaran Negara No. 4967. Accessed February 5, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- [2] Chambers, R. (1987). Pembangunan Desa mulai dari Belakang. Jakarta: LP3ES
- [3] Moenir, H, A, S. (2006). Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- [4] Suharto, E. (2009). Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Corporate Social Responsibility. Bandung: Alfabeta
- [5] Siporin, M. (1975). Introduction to Social Work Practice. New York: Macmillan Publishe
- [6] Dubois, Brenda & Karla K. Miley. 2005. Social Work an Empowered Profession. USA : USA. Pearson.
- [7] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember Accessed February 7, 2024. <file:///C:/Users/user/Downloads/PENGUNDANGAN%20PERDA%20PMKS.pdf>.
- [8] Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember Accessed February 8, 2024. file:///C:/Users/user/Downloads/PERBUP%2011_2021%20KSOTK%20DINAS%20SOSIAL%20OCR.pdf.
- [9] “Peluang dan Tantangan Pelayanan Kesejaht.Pdf” Accessed February 9, 2024. <https://media.neliti.com/media/publications/52870-ID-peluang-dan-tantangan-pelayanan-kesejaht.pdf>.
- [10] Wawancara dengan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Jember Ibu Rini Ramayanti S. sos
- [11] “379-Article Text-1451-1-10-20230606.Pdf” Accessed February 10, 2024. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/download/379/372>
- [12] “Profil Kab Jember.Pdf.” Accessed January 31, 2024. <https://snaiaikapd.or.id/hotel/Profil%20Kab%20Jember.pdf>.
- [13] Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023.

-
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- [14] Indonesia, Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023." Accessed February 10, 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- [15] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. (2023). Profil Kemiskinan Maret 2023 Kabupaten Jember. <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/11/285/profil-kemiskinan-maret-2023-kabupaten-jember.html>.
- [16] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. (2023). Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur 2023. Diakses dari https://bappeda.jatimprov.go.id/bappeda/wpcontent/uploads/dokren/rat_jatim_2023.pdf

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN